



PERATURAN DESA MADURAN
NOMOR : 11 TAHUN 2020
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA MADURAN



**KEPALA DESA MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA MADURAN
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADURAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MADURAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 34);
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 41);
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 42);
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 49);
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 51);
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015, Nomor 52);
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Dana Desa 2021 di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021, Nomor);
28. Peraturan Bupati Lamongan Nomor Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengalokasian dan Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 2021 di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021, Nomor);
29. Peraturan Desa Maduran Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
30. Peraturan Desa Maduran Nomor 2 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 ;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYARATAN DESA MADURAN,
dan
KEPALA DESA MADURAN,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA MADURAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADURAN TAHUN
ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		Rp. 1.497.244.400,00,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 294.079.400,00,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 850.000.000,00,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0,00	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 109.600.000,00,-	
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 243.565.000,00,-	
Jumlah Belanja		Rp. 1.497.244.400,00,-
Surplus/Defisit		Rp. 0
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0	
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Maduran

Ditetapkan di Maduran
Pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Maduran
Pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIAT DESA MADURAN,



LEMBARAN DESA MADURAN TAHUN 2020 NOMOR 11

Nomor Register Peraturan Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan : (...../Maduran/2020)